

Pengembangan energi alternatif butuh dua kebijakan pemerintah

Jakarta (ANTARA News) - Pengembangan energi alternatif seperti bioetanol memerlukan insentif pajak dan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Pajak untuk alkohol (dari bioetanol) sebagai bahan bakar tidak dapat disamakan dengan alkohol yang dikonsumsi oleh karena itu harus ada intervensi kebijakan," kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lukman Hakim, dalam jumpa pers di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong, Tangerang Selatan, Selasa.

Lukman mengatakan insentif pajak itu merupakan salah satu skema kebijakan yang ditujukan kepada industri yang memproduksi bioetanol.

"Insentif pajak juga dapat diberikan kepada industri yang membiayai riset energi alternatif, misalnya," kata Lukman.

Kebijakan kedua, menurut Lukman, adalah pengalihan anggaran subsidi BBM untuk riset energi alternatif.

"Harga jual etanol belum kompetitif jika dibandingkan dengan BBM subsidi. Itu berlaku untuk semua bahan bakar atau energi alternatif," kata Lukman.

Lukman membandingkan persentase alokasi dana riset di China sebesar dua persen dari produk domestik bruto (PDB), Korea sebesar empat persen, sedangkan Indonesia belum menyentuh satu persen (atau sekitar Rp75 triliun).

"Sering terdapat kesenjangan yang lebar ketika hasil kajian lembaga penelitian akan digunakan industri sehingga dibutuhkan peranan pemerintah sebagai fasilitator," kata Lukman.

LIPI memperkirakan cadangan minyak bumi di Indonesia akan habis pada 2024, cadangan gas akan habis pada 2042, sedangkan batu bara masih dapat digunakan hingga 2082.

(1026)

*Editor: Aditia Maruli*